

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Progam Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial untuk penduduk miskin, pada tahun 2007 dibentuklah keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).¹ Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah metode inisiatif penanggulangan kemiskinan yang menyalurkan donasi finansial kepada masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi rendah dan telah terpilih sebagai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).² Program Keluarga Harapan (PKH) diciptakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dinas Sosial, sebuah lembaga pemerintah yang berfokus pada masalah sosial dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini. Tujuan dari PKH adalah menciptakan mekanisme perlindungan sosial untuk warga Indonesia yang mengalami keterbatasan ekonomi.³ Pelaksanaan program ini telah sukses di beberapa Negara, program ini populer dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. Tujuannya ialah untuk mengetaskan kemiskinan lintas generasi serta memperkuat potensi sumber daya manusia.⁴

¹Yusuf Falaq, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Kudus: Maseifa Jendela Ilmu, 2021), 251.

²Mila Sari et al., *Metodologi Penelitian* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 104.

³ D S Silalahi, T Anggraini, and M Arif, "Policy Implementation Hope Family Program in Allenging Poverty in Labuhanbatu District (in Terms of Muqashid Sharia)," *Budapest Internasional Research and Critish Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5 No. 3 (2022), 22020, <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/6211>.

⁴.Ijang Ruswandi, Erry Sunarya, and Darmo H Suwiryo, "Implementation of the Hope Family Program " Policy At Purabaya Dictriect , Sukabumi , West Java," *International Journal Of Multi Science*, Vol 1 No. 5 (2020): 18.

Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 1 Tahun 2018 untuk mengulas tentang Program Keluarga Harapan (PKH), tertera pada Bab 1 Ketentuan Umum dalam pasal 1.⁵ PKH mempunyai tujuan pokok yaitu untuk meluaskan kemudahan atas fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, guna membawa tercapainya status kehidupan keluarga yang hidup dalam keadaan kurang mampu. Dengan demikian, PKH diperlukan agar membantu tanggungan pengeluaran dalam jangka pendek keluarga miskin serta menutup belunggu kemiskinan dalam jangka panjang. Dalam implementasi PKH, penyerahan dana bantuan ini dilakukan oleh pendamping PKH.⁶ Diharapkan nantinya Program Keluarga Harapan (PKH) akan meredakan tanggungan pengeluaran keluarga miskin dalam jangka yang singkat serta menutup mata rantai kemiskinan untuk jangka yang panjang. Hal ini disebabkan oleh upaya meningkatkan mutu kesehatan, pendidikan, serta menjaga taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menambah derajat hidupnya.⁷

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH memiliki tujuan utama, termasuk meningkatkan akses masyarakat miskin atas pelayanan kesehatan serta pendidikan. Bantuan tersebut menjadi focus utama membantu masyarakat peserta berinvestasi. Tujuan Program ini sekaligus mempercepat pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) atau program dalam upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan

⁵Dedeng Irawan, "The Role of Assistant Performance Moderation on the Effect of the Family Hope Program on Poverty Alleviation in Tanjungbalai City," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol 2 No. 1 (2021): 141.

⁶Rosita Tandos, "Re-Designing Poverty Eradication Programs in Indonesia," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, Vol. 4 No. 1 (2019): 55, <https://www.msocalsciences.com/index.php/mjssh/article/view/169>.

⁷Virna Museliza, Afrizal Afrizal, and Risma Eliza, Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol. 2 No. 1, 2020, 119-120.

manusia.⁸ Sedangkan tujuan khusus Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Menambahkan taraf ekonomi para Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
2. Peningkatan pendidikan anak-anak para Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
3. Memajukan tingkat kesehatan serta asupan gizi untuk ibu hamil, ibu sesudah melahirkan, dan anak-anak di bawah usia 6 tahun yang berasal dari keluarga yang sangat kurang mampu.
4. Meningkatkan ketersediaan serta mutu layanan pendidikan serta pelayanan kesehatan untuk keluarga yang sangat kurang mampu.
5. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga yang sangat kurang mampu dan rentan, sehingga menurunkan kemiskinan dan ketimpangan sosial.⁹

c. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun beberapa dasar peraturan yang mengatur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

1. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Keadilan Poin Lampiran 1 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
2. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Poin Lampiran Ke 46 Tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Manfaat Dan Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

⁸ Rini Hariyati, Pujiyanto, and Budi Hidayat, Determinants of Smoking among Program Keluarga Harapan Beneficiaries in West Jakarta, *Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Journal Of Community Medicine and Public Health)*, Vol. 37 No. 1, 2021, 9.

⁹ Herien Puspita, *Ekologi Keluarga Konsep dan Lingkungan Keluarga*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2018), 274.

3. Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.¹⁰
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial.

d. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan para Keluarga penerima manfaat (KPM) yang terkategoriikan sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi kriteria sebagai syarat berikut:

1. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) harus ibu rumah tangga dari keluarga yang telah dipilih melewati teknik seleksi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti ibu hamil atau sedang dalam masa nifas, mempunyai bayi dengan umur hingga enam tahun atau mempunyai anak yang masih bersekolah hingga usia 18 tahun.¹¹
2. Terdapat penambahan yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai tahun 2016, yaitu melibatkan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas berat, guna membantu penduduk kurang mampu yang mempunyai keterbatasan fisik serta memerlukan bantuan dalam aktifitas sehari-hari serta kepada penduduk berusia lanjut diatas 70 tahun.

¹⁰Haeruddin, Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Donggala, *Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2021, 104.

¹¹Fauzan Ali Rasyid and Moh. Dulhiah, "Political Will Implementation of The Government in Rasyid and Dulhiah.Hope Family Program Policy," *Journal of Governance*, Vol. 5 No. 1 (2020), 23–24, <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7597>.

Oleh sebab itu, agar keluarga wajib memenuhi syarat kriteria supaya tergolong dalam kategori rumah tangga miskin atau sangat miskin sehingga berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

e. Hak, Kewajiban dan Sanksi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai kewajiban, hak, serta sanksi yang wajib dipatuhi serta dijalani, berikut ini rincihannya:

1. Hak masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut
 - a. Menerima donasi sosial.
 - b. Memperoleh bimbingan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH)
 - c. Mendapatkan layanan bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pendidikan.
 - d. menerima bantuan tambahan dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, kepemilikan tanah dan bangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.¹²
2. Kewajiban penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tugas yang wajib diemban oleh penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ialah memenuhi ketentuan serta komitmen yang ditetapkan untuk secara aktif terlibat dalam pendidikan anak serta menjaga kesehatan keluarga terutama ibu dan anak-anak.¹³

a. Dalam bidang kesehatan

Tugas yang wajib dilaksanakan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) atas aspek kesehatan mencakup penyediaan sarana pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil, lansia dan penduduk disabilitas, selain itu mereka juga

¹² Daud Rismana, Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2019, 141–142.

¹³ Alfisyah, Elyn Normelani, and Deasy Arisanty, Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, *Jurnal Pendidikan Geograf (JPG)*, Vol. 4 No. 6, 2017, 3.

diharuskan untuk diberi makanan yang bergizi, menjalankan program imunisasi lengkap serta melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan pada anak-anak yang berusia dibawah lima tahun untuk mendeteksi masalah pertumbuhan yang disebut *stunting*.¹⁴

b. Dalam konteks pendidikan

Sedangkan untuk aspek pendidikan tugasnya ialah mendaftar dan mengantarkan anggota keluarga untuk bergabung pada proses pembelajaran untuk sekolah dasar dan sekolah menengah serta diwajibkan hadir minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulannya. Untuk anggota yang mempunyai disabilitas berat serta lanjut usia, kewajibannya akan disesuaikan dengan kondisinya.¹⁵

3. Sanksi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) jika tidak menjalankan kewajiban atau komitmen terkait dengan pendidikan dan kesehatan seperti disebutkan diatas, sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial RI. Peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi dan jika tidak memenuhi komitmen. Maka akan ada konsekuensi berupa sanksi seperti berikut¹⁶:

¹⁴Umi Faridav, Yusriadi Yusriadi, and Amar Saniv, "The Family Hope Program (PKH) Collective Partnership among Beneficiary Families (KPM) For Healthy Living through the Clean Friday Campaign," *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, Vol 15 No. 2 (2021), 4623, <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i2.15114>.

¹⁵ Fadhliaziz and Sarjono, Program Keluarga Harapan Dengan Simple Additive Weighting (SAW) Pada Dinas Sosial , Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 4 No. 2, 2019, 127..

¹⁶Nurma Mustika Hasna, Nugraha Nurhadji, and Indriyana Dwi Mustikarini, Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2, 2019,: 110.

- a. Setiap bulan sebelum penyaluran periode berikutnya, bantuan akan dikurangi sebesar 10%
- b. Jika seluruh komponen anggota tidak memenuhi kewajiban selama tiga bulan berturut-turut, maka peserta tidak menerima bantuan.
- c. Jika semua anggota Program Keluarga Harapan (PKH) dalam enam bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen, selain tidak mendapatkan bantuan juga akan dikeluarkan dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH).¹⁷

f. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Donasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) hanya disalurkan pada tahap awal setiap tahunnya. Sementara itu, bantuan dalam bentuk komponen diberikan hingga empat anggota keluarga yang memenuhi komponen program dan nilai bantuan tersebut dibagi pada tiga sesi selama setahun. Besaran dana subsidi yang diberikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berbeda-beda tergantung komponennya. Nilai subsidi yang diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Komponen kesehatan
 - a. Ibu yang sedang masa nifas atau tengah hamil mempunyai hak memperoleh bantuan sejumlah Rp. 3.000.000 setiap tahunnya.
 - b. Untuk anak-anak pada usia dini berwenang menerima bantuan Rp. 3.000.000 setiap tahun.
2. Komponen pendidikan
 - a. Anak-anak berusia 6 hingga 21 tahun belum menyelesaikan masa wajib belajar.
 - b. Anak-anak tingkat SD atau setingkatnya berhak menerima bantuan Rp. 900.000 per tahun.
 - c. Anak SMP atau setaranya mempunyai hak menerima bantuan Rp. 1.500.000 per tahun.

¹⁷ Sri Sutjiatmi and Farida Umaroh, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2, 2019, 5.

- d. Anak SMA atau seajarannya, berwenang mendapatkan bantuan Rp 2.000.000 per tahun.¹⁸
- 3. Komponen kesejahteraan sosial
 - a. Orang yang telah mencapai usia lanjut, yaitu 70 tahun keatas akan menerima donasi sebesar Rp. 2.400.000 setiap tahunnya.
 - b. Sementara itu, penduduk yang mengalami disabilitas berat akan mendapatkan bantuan Rp. 2.400.000 per tahunnya.¹⁹
- g. Tahap Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Penyaluran dana bantuan PKH pada tahun 2017 mengalami perubahan signifikan dalam metode penyalurannya. Sebelumnya tahun 2011 sampai 2016, bantuan ini diserahkan kepada peserta untuk mengambil langsung secara manual di Kantor Pos. tetapi pada tahun 2017, Kemensos RI mengimplementasi kebijakan baru yang mengarahkan penyaluran dana bantuan melalui rekening ATM peserta. Dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) sebagai mitra bank yang berkolaborasi dengan PKH. Setiap peserta diberikan kartu ATM BNI untuk menarik bantuan ini dari rekening karena sifatnya berbentuk uang tunai yang ditranfer atau *transfers cash money*.²⁰ Bantuan disalurkan setiap tahunnya dalam empat tahapan, dengan jeda tiga bulan antara satu tahap dengan tahap berikutnya. Penyaluran ini biasanya dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juni, dan Oktober. Setiap keluarga menerima bantuan yang

¹⁸ Yuliana Safitri, Fauzan Ramli, And Fadila Mawaddah, "Implementation Of The Hope Family Program In Increasing Community Welfare In Sharia Economic Perspective (Study In Mendalo Indah Village , Jambi Outer City District , Muaro Jambi District , Jambi Province)," *Journal Sustainability: Theory, Practice And Policy*, Vol. 1 No. 1 (2023), 70, <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1840>.

¹⁹ Zuhendra and Atika Surya Devi, Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Padangin Sosial Kota Padang 2020, *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, Vol. 1 No. 2, 2021, 98–99.

²⁰ Ayu Restianti, Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH), *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2017, 416.

berbeda-beda. Hal ini dikarenakan komponen kebutuhan yang ada dalam setiap keluarga beraneka ragam.²¹

Mekanisme pembagian Bantuan Sosial Beras (BSB) melibatkan kerjasama antara Kementerian Sosial, Perum BULOG dan Transporter sebagai pelaksana penyediaan Bantuan Sosial Beras (BSB). Kementerian Sosial bertugas mengawasi proses penyaluran untuk memastikan kesesuaian terhadap peraturan dan juknis yang ada. Hal ini melibatkan SDM, termasuk Pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang beroperasi disetiap wilayah pendampingan. Tugas pendamping mencakup penyuluhan serta verifikasi dalam mensosialisasikan dan memastikan Bantuan Sosial Beras (BSB) diterima KPM.²²

2. Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah elemen psikologis individu dalam merespons keberadaan berbagai faktor serta fenomena di lingkungannya, dan makna yang sangat komprehensif. Dalam konteks psikologis, persepsi merupakan proses menafsirkan serta menginterpretasikan informasi yang didapat melalui indera manusia seperti mendengarkan suara, menggunakan indera penglihatan untuk menatap gambar serta membaca, atau yang lain sebagainya.²³ Istilah “Persepsi” merupakan kata yang sering digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini merujuk akan cara individu atau masyarakat memberikan makna atau arti tentang berita informasi, kasus peristiwa, objek serta elemen lainnya yang bersumber dari daerah sekitar

²¹Depi Zahrawati and Henni Muchtar, Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman, *Journal of Civic Education (JCE)*, Vol. 1 No. 4, 2018, 389-390.

²² Muhammad Iqbal, Implementasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Nalu, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 17 No. 3, 2022, 716.

²³ Sugeng Sholehuddin, *Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Jawa Tengah Terhadap PTKIN Tahun 2015-2017*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 15-16.

mereka. Terkadang, kita juga menggunakan kata-kata seperti pandangan atau anggapan untuk merujuk pada konsep persepsi ini, disebabkan karena pada persepsi, seseorang memberikan respon terhadap suatu hal atau objek yang mereka temui.²⁴

Pemahaman masyarakat merujuk pada repon atau pemahaman mengenai lingkungan oleh sekelompok individu yang saling berinteraksi karena mereka memiliki nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang bersama-sama membentuk suatu sistem adat yang berkelanjutan. Sistem ini terikat oleh identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Secara sederhana, pemahaman masyarakat bisa dijelaskan sebagai serangkaian proses kognisi atau pengenalan dan afeksi atau evaluasi emosional (ketertarikan) masyarakat terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dan interpretasi pesan melalui berbagai indera seperti pendengaran, penglihatan, peraba dan lainnya.²⁵

b. Persepsi Dalam Pandangan Islam

Sebagai makhluk yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjalankan peran sebagai khalifah, manusia dikasih keunggulan berupa metode dan peran persepsi yang lebih kompleks serta lebih sulit dibandingkan dengan semua makhluk ciptaan Allah SWT yang lain. Di dalam Alqur'an surah Al-Mukminun ayat 12 sampai dengan 24, disampaikan bahwa manusia diciptakan lengkap dengan pembentukan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Meskipun tidak secara khusus diucapkan telinga dan mata, namun ada suatu fungsi yang sangat penting bagi manusia dan selalu pada keadaan beriringan.²⁶

²⁴ Monica Feronica Bormasa, Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Otonomi*, Vol. 13 No. 25, 2020, 73.

²⁵ Amtai Alaslan, Persepsi Masyarakat dan Kepemimpinan Perempuan, *Jurnal Otonomi*, Vol. 10 No. 20, 2017, 6.

²⁶ Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Dalam Al-Qur'an, Terapi Qur'ani Dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 49.

Proses persepsi diawali pada tahap perolehan indera, yang hanya mungkin terjadi karena adanya pengaruh dari luar yang baru serta memuat rangsangan yang kemudian membentuk suatu persepsi serta pengetahuan tentang lingkungan luar. Panca indera berperan sangat penting dalam melakukan persepsi, karena dapat membuat individu atau makhluk hidup bisa memahami informasi menjadi suatu hal yang bernilai.²⁷

3. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan sangat terkait dengan aspek kehidupan yang negatif. Kemiskinan diibaratkan sebagai keadaan pendapatan suatu keluarga atau individu yang tidak memenuhi standar hidup dalam bermasyarakat.²⁸ Pada sudut bahasa, miskin bersumber dari kata penghalang yang artinya tenang, sunyi, serta tidak bergerak. Meskipun kata kemiskinan diulang sebanyak 69 kali dalam Al-Qur'an, tiada terdapat satu ayat pun yang mengatakann siapa dan apa kriteria kemiskinan itu. Oleh karena itu, terdapat berbagai definisi kemiskinan di kalangan fuqaha. Menurut mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, kemiskinan terjadi pada mereka yang tidak memiliki kekayaan untuk dieksploitasi. Sedangkan mazhab Syafi'yyah dan Hanabilah mendefinisikan kemiskinan ialah kondisi dimana seseorang kekurangan dalam kekayaan dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan ketergantungannya, namun mereka masih belum memiliki batasan kifayah yang diperlukan. Sebagian fuqaha' lainnya menguraikan

²⁷ Sukati et al., *Psikologi Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 22.

²⁸ Zaihana Manshor, Shuhairimi Abdullah, and Abu Bakar Hamed, "Poverty and the Social Problems," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 10 No. 3 (2020): 615, <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v10-i3/7076>.

skala kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan minimal 50 persen.²⁹

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang terus meningkat setiap tahunnya meskipun pemerintah terus berupaya untuk mengurangi tingkat keparahan kemiskinan bahkan memberantasnya. Kemiskinan mengacu pada situasi dimana penduduk tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primernya, seperti makanan serta perumahan, serta keterbatasan ekonomi kini telah menjadi isu global dengan setiap negara memiliki cara tersendiri untuk mengatasi masalah ini. Indonesia telah berupaya mengatasi kemiskinan tetapi belum berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ini lebih jauh seperti yang diharapkan.³⁰

Tak terhitung banyaknya kebijakan dan insentif yang telah dilakukan untuk mengentaskan dan mengurangi kemiskinan, yang selama ini sulit diselesaikan karena berbagai permasalahan yang melingkupinya. Setiap daerah memiliki masalah kemiskinannya sendiri dan setiap negara menghasilkan solusi yang berbeda sehubungan dengan kriteria kemiskinan dan akar masalahnya yang unik.³¹ Terdapat beberapa strate untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya ialah dengan mengembangkan kapasitas manusia, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, akses ke layanan kesehatan dan gizi yang merupakan esensial untuk mengentas kemiskinan, sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas penduduk kurang mampu.³²

²⁹ Ahmad Azrin Adnan and Rosdalina Bukido, Poverty and Religiosity: The 'Missing Link' From Islamic Perspective, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 18 No. 2, 2020, 176.

³⁰ Darsono Wisadirana, Study on Characteristics of Poor Households in a Village in the Regency of Malang, East Java, Indonesia, *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 21, 2021, 676.

³¹ Ahmad Hudaifah and Shochrul Rohmatul Ajija, A Comparative Study On Poverty Alleviation Between Moslem And Non-Moslem Populated Countries, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 9 No. 1, 2017, 144.

³² Luthfi Faishal Azhar, Lilis Siti Badriah, and Bambang Bambang, "Family Hope Program Evaluation in Poverty Alleviation: Benefit Incidence Analysis," *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 9 No. 1 (2020): 99, <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i1.38471>.

Islam mempunyai cara untuk memberi perhatian dan mengatasi kemiskinan agar fakir dan miskin terhindar daripada kemiskinan. Dalam hal ini, mestilah fokus karena Islam berkonsepkan untuk menyempurnakan misi dan membina peraturan sosial dengan membantu antara satu dengan yang lain. Konsep yang dimaksudkan ialah orang kaya hendaklah menyimpan sebagian hartanya untuk diberikan kepada golongan fakir dan miskin, pemberian ini berbentuk zakat, shadaqah maupun infaq.³³

b. Kriteria Penduduk Miskin

Bersumber pada Badan Pusat Statistic (BPS) terdapat beberapa standar penduduk kurang mampualah:

1. Lebar lantai hunian tidak lebih dari 8 m² dalam perorangan
2. Bentuk ubin lantai hunian masih tanah.
3. Bentuk dinding tembok yang masih menggunakan bambu, kayu murah dengan kualitas rendah, ataupun dinding tanpa diplester.
4. Tiada mempunyai sarana air bersih
5. Tidak mempunyai sarana tempat buang air besar.
6. Pendapatan bersih kurang dari Rp. 350.000 perbulan.³⁴
7. Bahan bakar untuk memasak dapat diperoleh hanya dari kayu bakar, arang maupun minyak tanah.
8. Hanya sanggup membeli pakaian baru satu tahun sekali.
9. Hanya bisa makan sehari satu ataupun dua kali dalam sehari.
10. Tak memiliki kemampuan untuk menanggung biaya perawatan di fasilitas kesehatan manapun.

³³ Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, 2022, 44.

³⁴ Safuridar and Novera Dwi Suci, “Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh,” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2, 2017, 152–153.

11. Pendidikan tertinggi yang dicapai oleh kepala rumah tangga hanya mencapai tingkat Sekolah Dasar (SD) atau setara.
12. Tidak mempunyai simpan atau dapat dengan mudah dijual.

Jikalau setidaknya dari Sembilan kriteria yang disebutkan diatas tersalurkan, maka menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) individu tersebut telah termasuk dalam kategori miskin, sesuai dengan pedoman Kementerian sosial Republik Indonesia.³⁵

c. Bentuk - Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) terdapat empat kategori utama masalah kemiskinan yang beragam, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) bentuk kemiskinan absolut ialah situasi dimana individu atau kelompok individu tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimumnya seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan untuk dapat meningkatkan kehidupan yang layak.

2. Kemiskinan Relative

Kemiskinan relative berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mempunyai pengertian suatu kemiskinan dengan kondisi yang dipengaruhi karena kebijakan pembangunan pemerintah yang tidak dapat terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kondisi ketimpangan distribusi pendapatan. Penentuan kemiskinan relative amat bergantung dari cara pendapatan atau pengeluaran masyarakat didistribusikan.³⁶

³⁵ Ronsi Khairi, Kontekstualisasi Kriteria Fakir Miskin Dalam Pandangan Madzab Syafi'i Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih*, Vol. 4 No. 1, 2022, 56–57.

³⁶ Yusri, *Integrasi Kebijakan Regional dan Kemiskinan*, (Medan: Umsu Press, 2022), 13-15.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan jenis ini muncul karena akibat dari sikap dan perilaku budaya maupun adat masyarakat, dimana individu kurang berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Sikap ini meliputi penerimaan takdir yang berlebihan, kurangnya motivasi, pengeluaran boros, kurangnya kreativitas, serta keternagntungan pada bantuan orang lain.

4. Kemiskinan Struktural

Bentuk kemiskinan struktural muncul akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya yang berkembang dalam sebuah system sosial, budaya, dan politik yang tidak mendukung upaya untuk mengatasi kemiskinan, bahkan sering kali menyebabkan kemiskinan semakin bertahan. Kemiskinan ini disebabkan oleh kondisi dalam struktur kehidupan yang cenderung mempertahankan ketidaksertaan.³⁷

d. Penyebab Munculnya Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak penyebab yang bersifat kompleks dan dapat dibagi menjadi beberapa dimensi. Bberapa penyebab kemiskinan yaitu:

1. Globalisasi berdampak pada kemiskinan, adanya globalisasi menyebabkan negara yang berkembang terpinggirkan oleh persaingan dengan negara maju, sehingga mengakibatkan negara berkembang ini jumlah kemiskinannya semakin meningkat lebih signifikan dengan negara maju.
2. Pembangunan dapat terkait dengan kemiskinan, melaksanakan pembangunan kadang dapat menghasilkan berbagai bentuk kemiskinan, termasuk kemiskinan yang ada di wilayah perdesaan yaitu akibat proses pembangunan yang menyampingkan wilayah perdesaan, dan kemiskinan di kota apabila adanya pembangunan ini menjadikan kecepatan pertumbuhan ekonomi dan tidak seluruh segmen

³⁷Muhammad Ramadhan, *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Yayasan LKis, 2018), 75.

masyarakat perkotaan mengalami manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat tersebut.

3. Kondisi sosial yang kurang sejahtera, kemiskinan ini seperti dikarenakan adanya akibat diskriminasi sosial, ataupun penindasan ekonomi.
4. Kemiskinan konsekuensial, faktor ini merupakan faktor yang disebabkan oleh eksternal. Seperti bencana alam, tingginya jumlah penduduk, kerusakan lingkungan dll.³⁸

Selain dari penyebab yang diatas, kemiskinan pada umumnya berasal dari dua aspek, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal ialah alasan dibalik kemiskinan yang terjadi dari dalam individu yang mengalami kemiskinan, seperti sikap yang cenderung mendapatkan situasi apa adanya serta kurangnya usaha keras untuk meningkatkan kualitas hidup serta kondisi fiisk yang mungkin udah tidak selalui ideal. Sebaliknya faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar kondisi orang miskin tersebut, misalnya kurang lapangan kerja, terdapat bencana alam dan tidak adanya kesempatan untuk masyarakat miskin menjadi lebih baik hidupnya.³⁹

e. Dampak dari Munculnya Kemiskinan

Setiap permasalahan manusia tidak akan pernah lepas dari sebab akibat. Demikian dengan permasalahan ekonomi dan kemiskinan yang dihadapi manusia dapat memberikan pengaruh maupun imbas terhadap kehidupan manusia terutama dalam hal gaya hidup dan berperilaku. Dampak yang timbul dari adanya kemiskinan yang semakin tinggi bisa menimbulkan keadaan hidup manusia lebih parah. Adapun dampak dari munculnya kemiskinan yaitu:

1. Tindak kejahatan kriminalitas semakin tinggi, adanya kesenjangan sosial serta tingginya tingkat pengangguran membuat sebagian orang akan frustrasi

³⁸ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), 12.

³⁹ Indra Maipita, *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), 68.

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kriminalitas sering terjadi sebab adanya masalah ekonomi yang kurang sehingga seseorang akan mencuri barang milik orang lain dengan harapan dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.

2. Menurunnya moralitas, kondisi tersebut terbentuk dikarenakan adanya keinginan tinggi tetapi tidak bisa mewujudkan sampai kepada melampiasikan pada hal-hal yang tidak baik. Manusia yang dalam kehidupannya memiliki masalah kemiskinan kebanyakan mempunyai mental dan sikap atau moralitas yang kurang baik.⁴⁰
3. Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada ketidakmampuan individu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena kurangnya penghasilan, yang dapat menyusutkan daya saing serta tingkat pembelian masyarakat dengan konsekuensi terhadap tingkat pendapatan dan pengeluaran rata-rata.
4. Kekerasan, efek timbul dari adanya pengangguran mengakibatkan orang tidak mampu mencari nafkah dengan jalan yang halal dan benar apapun cara akan dilakukan termasuk dalam hal kekesaran seperti merampok, menodong maupun mencuri.
5. Pendidikan, biaya sekolah mahal menjadikan sebagian penduduk kurang mampu untuk bersekolah. Banyaknya seseorang yang putus sekolah berdampak rendahnya tingkat pendidikan dengan adanya hal tersebut membuat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu sulit. Sehingga dapat menimbulkan tingginya tingkat pengangguran akibat tidak dapat bersaing dengan yang lainnya.
6. Kesehatan, biaya pengobatan yang mahal membuat orang miskin lalai dengan kesehatan diri sendiri. Sehingga dampak dari kemiskinan terhadap kesehatan

⁴⁰ Devi Arfiani, *Berantas Kemiskinan* (Semarang: Alprin Finishing & Bindery Shop, 2019), 17-18.

menimbulkan orang miskin banyak yang memiliki penyakit namun tidak bisa berobat.⁴¹

Kemiskinan menurut hadits dari Nabi Muhammad SAW yakni suatu penyakit sangat berbahaya yang ditakutkan akan berdampak pada masyarakat umum ataupun terhadap individu. Adapun dampak dari munculnya kemiskinan menurut Islam adalah:

1. Kemiskinan dapat membahayakan akidah, seseorang yang hidup dalam lingkaran kemiskinan terkadang lupa bahwasanya mereka merupakan orang miskin dan jika mendapatkann rezeki mereka senang untuk hidup berfoya-foya dan tidak memiliki prinsip hidup serta tidak sabar akan kemiskinan yang dialami. Penyimpangan akidah semacam ini yang bisa membuat orang-orang menjadi miskin.
2. Kemiskinan membahayakan moral (akidah) dan etika, orang miskin dalam kehidupannya selalu merasakan kekurangan serta sengsara dan tidak bahagia. Karena mempunyai rasa selalu kurang itulah terkadang berbuat tindakan yang agama larang.
3. Kemiskinan membahayakan pemikiran manusia, kemiskinan membuat manusia tidak dapat berfikir dengan tenang dan lembut karna memikirkan kekurangan yang sedang dihadapi tersebut.
4. Kemiskinan membahayakan keutuhan keluarga, terbelenggu dalam kemiskinan bisa menjadi pemicu utama dalam kehancuran keluarga dan tekanan moral, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berkeluarga sehingga menyebabkan pertengkaran dan membahayakan keutuhan dalam berkeluarga.⁴²

f. Upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan

Dalam Al-Qur'an masalah sosial yang perlu diselesaikan ialah Kemiskinan, yang bahkan dianggap

⁴¹ Rubianto Siswosoemarto, Victor Hasibuan, and Dandang Iskandar, *Intelijen Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 51-53.

⁴² Atiqah Hamid, *Agar Terhindar Dari Kemiskinan* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 12-16.

sebagai masalah serius yang perlu diatasi. Islam tidak mendukung pandangan bahwa kemiskinan disebabkan oleh individu kurang mampu itu, dan bukan tanggung jawab masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Namun Islam juga tidak sepakat dengan pandangan struktural yang hanya menekankan pada akar penyebab struktural masalah kemiskinan.⁴³ Usaha untuk memberikan kesempatan lebih besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial serta membantu kemajuan ekonomi merupakan tujuan dari mengatasi kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terencana dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan setiap wilayah, mengikuti rencana pembangunan nasional jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan sebagai caramencapai saasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, salah satu indikator kunci keberhasilan pembangunan nasional ialah pengurangan jumlah penduduk miskin.⁴⁴ Pemerintah terus aktif berusaha untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui pelaksanaan berbagai program dengan yang dirancang untuk memerangi kemiskinan. Seperti menyalurkan bantuan sosial maupun dengan cara memberikan pekerjaan yang layak kepada orang yang membutuhkan. Pemerintah Indonesia memberikan upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui program-program seperti:

1. Program Keluarga Harapan (PKH), program ini bertujuan untuk menurunkan beban dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan bantuan tunai.
2. Melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pemerintah bertujuan untuk menyediakan data mengenai biaya pendidikan sebagai langkah untuk

⁴³ Muhammad Istan, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol 2 No. 1, 2017, 94.

⁴⁴ Anjela Wongkar, Tri Oldy Rotinsulu, and Mauna Maramis, Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 23 No. 3, 2023, 50.

mewujudkan program wajib belajar 9 tahun yang berkualitas. Program BOS ini ditujukan kepada seluruh siswa yang berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiya (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Maadrasah Tsanawiyah (MTs) dan termasuk juga Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia.⁴⁵

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), program ini bertujuan pemberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.⁴⁶
4. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program BPTN ini berfokus membantu keluarga yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan konsumsi. Besaran BPNT dilaksanakan dalam bentuk *e-voucher* (Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) yang dilakukan mulai bulan Februari 2017. Dana tersebut sebesar Rp110.000 per keluarga yang diberikan setiap bulan..⁴⁷

Pemerintah telah melaksanakan berbagai macam program untuk mengatasi kemiskinan, beberapa telah disebutkan diatas. Semua program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Lembaga atau Kementerian dengan bekerja keras merupakan upaya nyata untuk menurunkan jumlah penduduk miskin⁴⁸

⁴⁵ Zainal Efendi Burlian, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar* (Malang: Inteligencia Media, 2020), 190.

⁴⁶ Maria Sumardjono and Imam Kuswahyono, *Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal : Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020), 59.

⁴⁷ Rosita Tandos, Re-Designing Poverty Eradication Programs in Indonesia, *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, Vol. 4 No. 1, 2019, 55

⁴⁸ Dimas Aditya Nugraha, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II* (Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informasi RI, 2011), 42.

4. Persepektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang mengkaji cara manusia mengarahkan dan menguruskan sumber daya dengan tujuan mencapai falah, dengan landasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Prinsip ekonomi Islam Yaitu:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini merupakan sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Berkenaan dengan prinsip tauhid telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi:⁴⁹

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*(Qs. Al-Hadid Ayat 4).⁵⁰

Dalam Surah Ali Imran ayat 109 juga menjelaskan mengenai prinsip tauhid yaitu:

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ

Artinya *“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah*

⁴⁹ Ivonne Ayesha et al., *Ekonomi Mikro Islam* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 7.

⁵⁰ Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita *“Surah Al-Hadid Ayat 4”* (Bandung: Penerbit Jabal), 538.

segala urusan dikembalikan.” (Qs. Ali Imran ayat 109)⁵¹.

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah memiliki peranan yang sangat penting karena mengajarkan kepada manusia bahwa dalam interaksi sosialnya (hubungan horizontal), sama tingginya pentingnya dengan hubungannya dengan Allah (hubungan vertikal). Artinya, aktivitas ekonomi manusia harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial yang diambil dari Alquran.⁵²

b. Prinsip Keseimbangan

Seimbang yang dimaksud dalam prinsip ini ialah keseimbangan dunia dengan akhirat, manusia dalam melaksanakan kegiatan ekonomi selain untuk mencukupi kebutuhan didunia juga merupakan ladang ibadah bagi manusia jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Serta bukan hanya untuk individu tapi keseimbangan dalam penyaluran kekayaan melalui shodaqoh, zakat, sedekah maupun yang lain demi meningkatkan kesejahteraan bersama.⁵³

Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Surah Al-Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا نَّهْ وَفِينَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya : ” Dan di antara mereka ada yang berdoa, ”Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka” (Qs. Al-Baqarah Ayat 201).⁵⁴

Serta dalam Al-Qura’an Surah Al-Hadid ayat 7 :

⁵¹ Aisyah Al-Qur’an Dan Terjemah Untuk Wanita “Surah Ali Imran Ayat 109” (Bandung: Penerbit Jabal), 64.

⁵² Amirullah, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alaudin University Press, 2014), 38.

⁵³ Achmad Fadlil Abidillah et al., *Ekonomi Islam : Perspektif Filsafat & Ilmu Pengetahuan*, ed. Ari Prastio (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021), 283.

⁵⁴ Aisyah Al-Qur’an Dan Terjemah Untuk Wanita “Surah Al-Baqarah Ayat 201” (Bandung: Penerbit Jabal), 31.

أَمُّوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya : *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar". (Qs. Al-Hadid ayat 7).*⁵⁵

Maksud kedua ayat diatas ialah bahwasanya kebaikan di dunia serta di akhirat bukan hanya mengenai iman yang kuat serta memikirkan diri sedniri akan tetapi juga harus diimbangi dengan tidak lupa akan hak-hak kekayaan manusia kepada yang membutuhkan.

c. Prinsip Khalifah

Dalam Al-Qur'an manusia diciptakan menjadi khalifah ntuk di Bumi yaitu untuk menjadi pemimpin dan pemakmuran Bumi. Pada dasarnya setiap manusia ialah menjadi pemimpin Nabi Muhammad SAW bersabda:

"setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya."

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian, peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia untuk memajukan kesejahteraan serta tercapainya untuk melindungi keimanan, jiwa akal, kehormatan dan

⁵⁵ Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita "Surah Al-Hadid Ayat 7" (Bandung: Penerbit Jabal), 31.

kekayaan manusia. Sebagaimana yang telah di firmankan Allah di Qs. Al-Baqarah ayat 30 yaitu:⁵⁶

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Q. Al-Baqarah Ayat 30).⁵⁷

d. Prinsip Keadilan

Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat yang namanya keadilan dalam menjalankan suatu hal. Adil disini ialah menurut Islam tidak berat sebelah. Dalam agama Islam sifat adil sangat dijunjung tinggi, umat manusia mempunyai tanggungan atas keluarganya, fakir miskin dan semua makhluk yang berada di bumi.⁵⁸ Dalam berkehidupan sehari-hari prinsip keadilan berarti harus jujur serta menghindari gharar, riba dan ahlak tercela lainnya sebab hal tersebut dapat merugikan dan menindas suatu pihak. Prinsip keadilan ini ditegaskan sebagai upaya menghindari kezaliman kepada sesama

⁵⁶ Reza Nurul Ichsan, Saleh Sitompul, and Safrul Daulani, *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam*, ed. Lukman Nasition (Medan: Alaudin University Press, 2020), 33.

⁵⁷ Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita “Surah Al-Baqarah Ayat 30” (Bandung: Penerbit Jabal), 6.

⁵⁸ Mandani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 17.

manusia karena hal tersebut secara tegas dilarang oleh Allah SWT sesuai dalam QS Ali Imran ayat 135 :⁵⁹

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَمَٰمُ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan barang siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui” (Qs. Al-Baqarah ayat 30).⁶⁰

Yang maknanya ialah kita dilarang untuk mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri maupun terhadap orang lain dan kita harus memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan serta tidak berbuat dosa lagi.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait topik pembasahan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi acuan atau pedoman atau referensi penelitian. Adapun beberapa referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh Nurul Fahmi dan Khoiril Anwar tahun 2020 dengan judul: ”Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan”, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan serta faktor-faktor yang menjadi

⁵⁹ Siti Zulaikha et al., *Filasafat Ekonomi Islam : Menjawab Tantangan Peradaban*, ed. Ari Prasetyo (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021), 370.

⁶⁰ Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita “Surah Ali Imran Ayat 135” (Bandung: Penerbit Jabal), 67.

penghambat dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa implementasi pemberian bantuan PKH kepada masyarakat miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan berjalan cukup baik serta terdapat kendala dalam implementasi program ini yaitu terdapat faktor internal dan eksterna.⁶¹

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fahmi dan Khoiril Anwar dan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan serta faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan. Perbedaan dari penelitian Nurul Fahmi dan Khoiril Anwar tidak membahas mengenai faktor mendukung implementasi program PKH sedangkan dalam penelitian peneliti ini membahas mengenai faktor mendukung program PKH terhadap menanggulangi kemiskinan dalam penelitian Nurul Fahmi dan Khoiril Anwar menggunakan penelitian pendekatan Sosiologis dan penelitian peneliti menggunakan penelitian deskriptif dan objek penelitian atau lokasi tempat penelitian yang berbeda.

2. Penelitian dari Depi Zahrawati dan Henni Muchtar yang dilakukan tahun 2018 dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman”. Tujuan adalah penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, serta untuk mengetahui Apa faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat implementasi Program di Nagaria Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasamah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

⁶¹ Nurul Fahmi and Khoiril Anwar, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan,” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, (2020), <https://doi.org/10.56633/jsie.v1i2.168>.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Depi Zahrawati dan Henni Muchtar ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program PKH di Nagara Malampah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Sosial No 01 tahun 2018, namun masih ada beberapa penerima bantuan tidak berkomitmen terhadap kewajibannya. Serta terdapat faktor pendukung dan penghambat adalah mengimplementasikan program PKH di Nagari Malampah.

Persamaan antara penelitian Depi Zahrawati dan Henni Muchtar dengan penelitian peneliti ini adalah jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif serta sama-sama membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Depi Zahrawati dan Henni Muchtar dalam objek penelitian atau lokasi tempat penelitian yang dilakukan berbeda.⁶²

3. Penelitian Oleh Yulina Safitri, Fauzan dan Fadila Mawaddah dengan judul “*Implementation Of The Hope Family Program In Increasing Community Welfare In Sharia Economic Perspective (Study In Mendalo Indah Village, Jambi Outer City District, Muaro Jambi District, Jambi Province)*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, dan mengetahui apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dari Yulina Safitri, Fauzan dan Fadila Mawaddah menunjukkan Adanya Program Keluarga Harapan di tengah masyarakat miskin memang sangat membantu dalam meringankan beban keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhannya, juga terdapat faktor penghambat yaitu berasal dari internal dan eksternal dan juga ada faktor

⁶²Depi Zahrawati and Henni Muchtar, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman,” *Journal of Civic Education (JCE)*, Vol. 1 No. 4, (2018), 10.30601/humaniora.v2i1.51.

pendukung seperti adanya komunikasi yang baik antar pendamping dengan KPM serta dukungan pemerintah⁶³ Persamaan dari penelitian Yulina Safitri, Fauzan dan Fadila Mawaddah dengan penelitian peneliti ialah sama membahas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan . Serta perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Yulina Safitri, Fauzan dan Fadila Mawaddah ialah objek penelitian atau lokasi penelitian yang berbeda tempat.

4. Penelitian oleh Musaiyadi, Sunarsih dan Nadatul pada tahun 2023 dengan judul “*Analysis Of The Influence Of The Hope Family Program (PKH) On Poverty In Patrang District, Jember District*”, penelitian yang dilakukan oleh Musaiyadi, Sunarsih dan Nadatul ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kecamatan patrang Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data yaitu kuesioner, wawancara dan dtinjauan pustaka.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Musaiyadi, Sunarsih dan Nadatul adalah program PKH yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan berpengaruh secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan.⁶⁴ Persamaan penelitian Musaiyadi, Sunarsih dan Nadatul dengan penelitian oleh peneliti ini sama membahas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Perbedaannya pada penelitian terdahulu oleh penelitian Musaiyadi, Sunarsih dan Nadatul jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan

⁶³ Yuliana Safitri, Fauzan Ramli, And Fadila Mawaddah, “Implementation Of The Hope Family Program In Increasing Community Welfare In Sharia Economic Perspective (Study In Mendalo Indah Village , Jambi Outer City District , Muaro Jambi District , Jambi Province),” *Journal Sustainability: Theory, Practice And Policy*, Vol. 1 No. 1 (2023), 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/Sdgs.V1i1.1840>.

⁶⁴ Musaiyadi, Sunarsih and Nadatul Humairoh, “Analysis Of The Influence Of The Hope Family Program (PKH) On Poverty In Patrang District, Jember District”, *International Conference On Economics, Business and Information Technology (ICEBIT)*, Vol. 4 No. 1, (2023).

metode kualitatif. dalam penelitian peneliti membahas mengenai peran dari PKH dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan faktor penghambat serta faktor pendukung PKH sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya membahas pengaruh PKH terhadap kemiskinan. Dan pada lokasi atau objek penelitian yang diteliti berbeda.

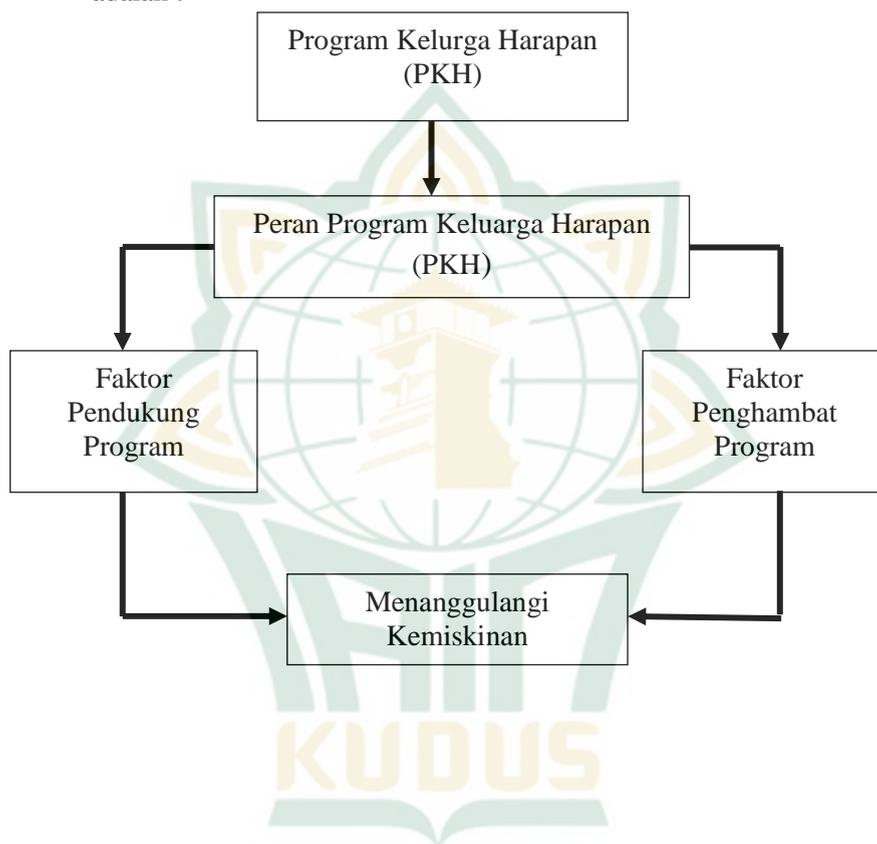
5. Penelitian dari Rika Rahmadina dan Evi Asriani tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Rambang Kapak Tengah”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rika Rahmadina dan Evi Asriani pada tahun 2021 ini ialah untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Rmbang Kapak Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian Rika Rahmadina dan Evi Asriani adalah adanya pengaruh positif 75,7% Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membantu mengurangi kemiskinan di Kecamatan Rambang Kapak Tengah.⁶⁵

Persamaan dari penelitian Rika Rahmadina dan Evi Asriani dengan penelitian peneliti sama membahas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan. Perbedaannya penelitian Rika Rahmadina dan Evi Asriani menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan dalam penelitian Rika Rahmadina dan Evi Asriani tidak membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat program PKH dalam menanggulangi kemiskinan sedangkan dalam penelitian ini membahas topik tersebut, serta objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda antara Rika Rahmadina dan Evi Asriani dengan penelitian penelitian.

⁶⁵ Rika Rahmadina Putri and Evi Asriani, “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Rambang Kapak Tengah,” *Lariba : Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 3 No. 1, (2021).

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran peneliti yaitu penjelasan terhadap gejala-gejala objek yang menjadi bahan objek penelitian.⁶⁶ Jadi kerangka didalam penelitian ini adalah :



⁶⁶ Tegor et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 40.